BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam kegiatan rutin dan proyek membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagai gambaran yang ada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggran 1995/1996 sebesar 78,024 trilyun rupiah, tahun 1996/1997 sebesar 90,616 trilyun rupiah, dan tahun anggaran 1997/1998 sebesar 101,087 trilyun rupiah. Dari gambaran angka tersebut diatas, peningkatan yang terjadi setiap tahunnya kurang lebih diatas 10%.

Salah satu komponen yang cukup menyedot dana APBN pada anggran pengeluaran rutin adalah Subsidi Daerah Otonom, Sub komponen Belanja Pegawai. Dari data yang ada, Subsidi Daerah Otonom untuk belanja pegawai dalam tahun anggaran 1995/1996 sebesar 7,932 trilyun rupiah, tahun anggaran 1996/1997 sebesar 9,496 trilyun rupiah, dan untuk tahun anggaran 1997/1998 ini adalah sebesar 10,968 trilyun rupiah, sehingga kalau kita bagi dengan keseluruhan dana APBN dalam masing – masing tahun anggaran dihasilkan persentase kurang lebih 10%

Dengan melihat gambaran besarnya dana yang ada dalam tiap tahun anggaran, baik untuk keseluruhan dana APBN maupun untuk anggaran pengeluaran Subsidi Daerah Otonom, Sub komponen Belanja Pegawai, mau tidak mau diperlukannya suatu perencanaan yang matang dan akurat dalam menyiapkan angka – angka tersebut sehingga perencanaan dana yang dilakukan benar – benar

dapat menampung seluruh kegiatan yang ada dan benar – benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangakan untuk menghasilkan perencanaan yang matang dan akurat tadi, membutuhkan angka atau data realisasi pelaksanaan kegiatan yang sama dalam tahun – tahun anggaran sebelumnya. Dana yang ada APBN tersebut sebagian besar disalurkan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) kepada instansi – instansi pemerintah yang dilayaninya, termasuk penyaluran Subsidi Daerah Otonom kepada Pemerintah Daerah baik Tingkat I maupun Tingakat II.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-67/44/0594 tanggal 9 Mei 1994, mulai tahun anggaran 1994/1995 diminta kepada KPKN agar menyampaikan rekapitulasi daftar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom (PNS DO) per semester dalam bulan Januari dan Juli, terhitung mulai bulan Juli 1994 kepada PPDIA untuk diolah lebih lanjut menjadi laporan realisasi pembayaran gaji PNS DO seluruh Indonesia tahun anggaran berjalan. Rekapitulasi pembayaran gaji PNS DO yang dikirim oleh KPKN kepada PPDIA merupakan copy rekap yang diajukan oleh satuan kerja yang ada dibawah Pemda kepada biro keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang tembusannya disampaikan kepada KPKN. Selanjutnya SPMU yang diterima oleh KPKN nantinya akan mengurangi dana SDO pada Pemda yang bersangkutan (terjadi realisasi pengeluaran di luar APBN) dan penerimaan potongan yang ada merupakan penerimaan diluar anggaran. Sebelum proses ini terjadi, KPKN terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nihil sebagai penyedian dana bagi Pemda yang bersangkutan untuk membiayai segala belanja pegawai yang dilakukan oleh instansi yang berada

dibawahnya (sebagai realisasi pengeluaran anggaran) dan penerimaan potongan yang ada merupakan penerimaan anggaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembukuan yang dicatat dua kali untuk satu realisasi anggaran yang terjadi. Adapun arus dokumen dari data gaji PNS DO tersebut adalah:



Dengan melihat tugas dan fungsi PPDIA diatas dan dikaitkan dengan penyedian data realisasi anggaran tahun anggaran yang berjalan bagi bahan perencanaan anggaran tahun anggaran selanjutnya, baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan termasuk di dalamnya data realisasi pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom (PNS DO), tentu saja keberadaan PPDIA sangat penting dan memiliki tugas yang berat. Untuk itulah dibutuhkan koordinasi yang sangat erat antara PPDIA, sebagai unsur pengumpul dan pengolah data, dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), sebagai unsur penyumbang data.

Berdasarkan fenomena – fenomena tersebut, maka penulis menetapkan judul :

"PROSES KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH OTONOM PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ANGGARAN (PPDIA) BANDUNG".

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini secara garis besar terbagi atas beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menilai koordinasi yang sudah berjalan antara PPDIA dan KPKN dalam menghasilkan Laporan Realisasi Pembayaran Gaji PNS DO yang berkualitas.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan menilai kendala – kendala dalam menciptakan koordinasi yang baik antara PPDIA dan KPKN.
3. Dengan mengetahui dan memahami koordinasi yang ada antara PPDIA dan KPKN diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang prinsip - prinsip dan penerapan koordinasi sebagai bagian dari fungsi – fungsi manajemen.
4. Mempraktekan ilmu yang didapat semasa kuliah.
5. Dan pada akhirnya diharapkan dapat membantu mengatasi masalah – masalah yang mungkin timbul.

1.3. Metodologi Penelitian

Untuk suatu penelitian diperlukan suatu cara pengumpulan data, analisa dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif analisis yaitu suatu studi penelitian yang menggambarkan/melukiskan serta menuturkan peristiwa yang terjadi, kemudian dianalisa lebih lanjut, sedangkan teknik yang penulis pergunakan antara lain:

1. Telaah dokumen yaitu penulis mengumpulkan data gaji PNS DO yang diterima oleh PPDIA Bandung untuk bulan Juli 1997 selanjutnya dianalisis menurut kebutuhan yang ada.

2. Wawancara yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab/wawancara secara langsung dengan para pejabat di PPDIA untuk mendapatkan data yang diperlukan.
3. Study Kepustakaan yaitu penulis mencari sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis maupun tercatat untuk kepentingan laporan.

1.4. Pembatasan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang ada, beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini adalah:

1. Sejauh manakah peranan koordinasi antara PPDIA dan KPKN yang sudah berjalan dalam menghasilkan Laporan Realisasi Pembayaran Gaji PNS DO yang berkualitas?
2. Hal – hal apa sajakah yang menjadi kendala dalam menciptakan koordinasi baik antara PPDIA dengan KPKN, sehingga akan mendukung peningkatan kualitas Laporan Realisasi Pembayaran Gaji PNS DO yang dibuat oleh PPDIA?

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Metodologi Penelitian

1.4 Pembatasan masalah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori permasalahan yang diambil, yaitu mengenai pengertian koordinasi, laporan dan gaji pegawai negeri sipil.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Semua informasi yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan kualitas laporan realisasi pembayaran gaji pegawai negeri sipil daerah otonom pada PPDIA

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Melakukan analisis terhadap data hasil penelitian berdasarkan daftar pustaka serta bidang ilmu yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Mengumpulkan hasil analisa dan memberi masukan saran bagi perbaikan sistem di perusahaan.